



ANALISIS FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI BANTEN

Fitri Amalia (v3amalia@gmail.com)

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ABSTRACT

This study aims to identify the flypaper effect on the country and city in Banten Province in 2010-2013. The main objective of this research is to provide empirical evidence for the occurrence of flypaper effect on General Allocation Fund (DAU) and Local Revenue (PAD) to Regional Expenditure (BD) of country/city in Banten Province. In this case, the dependent variable used is the shopping area while the independent variable is PAD and DAU. Object of research include 8 counties and cities in Banten Province with data source Realisasi Budget Report 2010-2013. Design research using model hypothesis testing using secondary data in the form of panel data. The method of analysis of data used is multiple regression. This research result indicates that (1) PAD and DAU simultaneously influence significantly to regional expenditure, (2) PAD and DAU partially influential significantly against regional expenditure, (3) there is no flypaper effect on contry and city in Banten in the 2010-2013.

Keywords: flypaper effect, general allocation fund, local revenue, regional expenditure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten dan kota di Provinsi Banten tahun 2010-2013. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan bukti empiris terjadinya *flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten. Dalam hal ini, variabel dependen yang digunakan adalah belanja daerah sedangkan variabel independennya adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Objek penelitian meliputi 8 kabupaten dan kota di Provinsi Banten dengan sumber data yang diperoleh dari Laporan Realisasi APBD 2010-2013. Desain penelitian menggunakan model pengujian hipotesis dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, (2) PAD dan DAU secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah, (3) tidak terjadi *flypaper effect* pada kabupaten dan kota di Provinsi Banten pada tahun 2010-2013.

Kata kunci: belanja daerah, dana alokasi umum, *flypaper effect*, pendapatan asli daerah

Implementasi desentralisasi menandai proses demokratisasi di daerah mulai berlangsung. Setidaknya hal tersebut diindikasikan dengan terbentuknya pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola pembangunan di daerah, tanpa dihalangi oleh kendala struktural yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri masyarakat di daerahnya lebih dikenal dengan sebutan Otonomi Daerah. Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah dilakukan agar kesejahteraan yang didapat oleh seluruh masyarakatnya dapat merata atau tidak hanya sebagian orang saja yang merasakan kesejahteraan.

Dalam hal pengelolaan pembangunan dan keuangan, daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan dan pengelolaan anggaran di sisi penerimaan dan pengeluaran. Setiap daerah diwajibkan untuk membuat suatu rencana atau rancangan keuangan daerah yang biasanya disebut dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah yang sebelumnya telah dibahas dan telah disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (UU no 32 tahun 2004). Tujuan perancangan APBD ini adalah agar pemerintah daerah dapat memperkirakan berapa jumlah besaran pendapatan yang akan diterima dan besaran jumlah pengeluaran yang akan dibelanjakan.

Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah dalam era otonomi daerah ini haruslah terkait dengan penyediaan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan ataupun serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Bentuk pelayanan publik yang dimaksud dapat berupa pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, perumahan rakyat, penataan ruang, perlindungan lingkungan hidup dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kebutuhan pelayanan publik berbeda-beda di setiap daerah. Dalam rangka menyediakan pelayanan publik, maka pemerintah daerah melakukan suatu pengeluaran yang disebut belanja daerah. Permasalahan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah terlalu menggantungkan diri pada alokasi DAU untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Di saat alokasi DAU yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah akan berusaha agar pada periode berikutnya Dana Alokasi Umum yang diperoleh tetap porsi nominalnya. Kuncoro (2004) menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling besar 20%. Kenyataan inilah yang menimbulkan perilaku asimetris pada pemerintah daerah. Untuk melihat apakah terjadi indikasi *inefisien* pada dana transfer tersebut, dapat dilihat dari respon pengeluaran pemerintah yang lebih dikenal dengan teori *Flypaper Effect*.

Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi yang terbentuk setelah adanya otonomi daerah diharapkan dapat lebih mampu berinovasi serta mengeksplorasi sumber-sumber alam yang terkandung di wilayahnya. Lambat laun ketergantungan kepada pusat dapat dihilangkan seiring dengan adanya penambahan PAD. Kontribusi PAD memiliki peranan dalam rencana peningkatan kemampuan daerah dari segi keuangan agar tidak harus selalu bergantung pada pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan representasi pendapatan yang dihasilkan oleh daerah

tersebut. Artikel ini akan mengidentifikasi terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten dan kota di Provinsi Banten tahun 2010-2013.

Belanja Daerah

Belanja Daerah (BD) berkaitan dengan Konsumsi Daerah. Pengeluaran konsumsi terdiri dari konsumsi pemerintah (*government consumption*) dan konsumsi rumah tangga (*household consumption/private consumption*). Menurut Mankiw (2007), pembelian pemerintah atau belanja pemerintah adalah permintaan terhadap barang dan jasa. Pembelian pemerintah atas barang dan jasa dapat digolongkan kepada dua golongan yaitu konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. Menurut Prasetya (2012:5), dalam teori pengeluaran pemerintah maka pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori tentang pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu Teori Makro dan Teori Mikro.

a. Teori Makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan.

b. Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah yang akan disediakan melalui anggaran belanja.

Menurut Kesumadewi dan Rahman (2007), belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam satu periode anggaran. Darise (2009) mengelompokkan belanja daerah menurut fungsi, organisasi, program, kegiatan, kelompok belanja, dan jenis belanja.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, fungsi pengelolaan keuangan negara. Belanja penyelenggaraan urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem sosial yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pelayanan standar minimal. Urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan berasal dari APBN. Tujuan diberikannya dana ini adalah untuk pemerataan kemampuan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan daerah, kebutuhan akan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan juga potensi daerah (UU No 33 Tahun 2004). Adapun kebutuhan daerah ini dicerminkan dengan faktor luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan tingkat pendapatan

masyarakat di daerah tersebut. Sedangkan untuk kapasitas fiskal dicerminkan dengan faktor dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Dana Alam. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar. Besarnya besaran DAU menurut Pasal 37 PP nomor 55 tahun 2005 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto.
2. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
3. Dalam penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10% dan 90%.
4. Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APBN.

Proporsi DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam hal penentuan proporsi belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan imbang 10% (sepuluh persen) untuk Provinsi dan 90% (sembilan puluh persen) untuk Kabupaten/Kota. DAU untuk satu daerah dihitung dengan menggunakan formula:

$$\text{DAU} = \text{CF (Celah Fiskal)} + \text{AD (Alokasi Dasar)}$$

Celah Fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, antara lain adalah penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Alokasi Dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian Pegawai Negeri sipil termasuk di dalamnya tunjangan beras dan tunjangan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21). Kebutuhan fiskal diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, Produk Regional Bruto per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya. Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung pada keadaan perekonomian dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri Bahrul (2010). Sementara Darise (2009) mengemukakan, Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan.

Menurut Bastian (2006), Pendapatan Asli Daerah meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :

1. Pajak daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pembangunan daerah.
2. Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, yaitu hasil penyertaan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu pendapatan asli daerah yang tidak termasuk pada kelompok di atas.

Flypaper Effect

Analisis mengenai *Flypaper Effect* mengandung dua prinsip dasar yaitu: 1) model yang menunjukkan bagaimana pemerintah merespon bantuan dana transfer (*grants*) yang akan digunakan untuk mengukur demand pelayanan publik; 2) model median (rata-rata) merupakan model yang dipilih untuk melihat respon transfer per wilayah yang menerima bantuan dana transfer dari pemerintah, dimana pemerintah melihat ada indikasi bahwa dana yang diberikan harus habis untuk dibelanjakan, sehingga anggapan tersebut dapat mempengaruhi pendapatan daerah mereka sendiri. (Tresch, 2002).

Flypaper Effect adalah suatu kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah merespon belanja daerah dengan lebih banyak mengandalkan atau menggunakan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat yang terdiri dari DAU dan DAK dibandingkan dengan menggunakan kemampuan daerahnya sendiri yang berasal dari PAD (Maimunah, 2006). Flypaper Effect itu sendiri merupakan respon yang tidak simetris atau asimetris terhadap peningkatan dan penurunan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat, dimana Tresch (2002) menyatakan bahwa dana transfer tersebut diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan indikasi adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari penerimaan transfer (*grants*) yang cenderung meningkat. Dengan kata lain penemuan flypaper effect pada alokasi pengeluaran, maka diharapkan pemerintah dapat seminimum mungkin memperkecil respon yang berlebihan pada belanja daerah.

Flypaper Effect terjadi karena adanya superioritas pengetahuan birokrat mengenai transfer dari pemerintah pusat. Informasi lebih yang dimiliki oleh birokrat ini memungkinkan para birokrat ini melakukan pengeluaran yang berlebih. Terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya *flypaper effect* pada Belanja Daerah. Hal tersebut diperkuat oleh Deller dan Maher (2005) yang meneliti mengenai kategori pengeluaran daerah dengan fokus pada terjadinya *flypaper effect*. Mereka menemukan pengaruh *unconditional grants* pada kategori pengeluaran lebih kuat pada kebutuhan non esensial atau kebutuhan *luxury* seperti taman dan rekreasi, kebudayaan dan pelayanan pendidikan daripada kebutuhan esensial atau normal seperti keamanan (*police*) dan proteksi terhadap kebakaran. Penelitian Legrenzi dan Milas (2001) juga memberikan bukti empiris tentang adanya *flypaper effect* dalam jangka panjang untuk sampel *municipalities* di Italia. Mereka menyatakan bahwa *local governments consistently increase their expenditure more with respect to increase in State transfer rather than increase in own revenues*.

Berdasarkan kajian teori di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.
2. Diduga Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah
3. Diduga pengaruh DAU terhadap BD lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap BD

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel independen dan 1 (satu) Variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah (BD). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu. Dalam penelitian ini data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode data panel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* yaitu data tahun 2010-2013 dan data *cross section* yaitu data 8 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Banten yang terdiri dari: Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Kota Cilegon, Tangerang, Serang dan Tangerang Selatan. Anggota populasi yang ada diambil secara keseluruhan menggunakan teknik sensus atau disebut sampel jenuh.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan *software* statistic Eviews 6 untuk menjawab semua tujuan dari penelitian ini. Tahapan analisis dalam penelitian ini terdiri dari: estimasi model regresi dengan menggunakan data panel, uji asumsi klasik, uji analisis regresi dan analisis ekonomi. Model persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$BD_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + e$$

Dimana :

- BD : Belanja Daerah
PAD : Pendapatan Asli Daerah
DAU : Dana Alokasi Umum
i : *Cross-section*
t : *Time series*
 β_0 : Intesep/konstanta
 β_1, β_2 : Koefisien regresi
e : *Error term*

Estimasi model panel data tergantung kepada asumsi yang dibuat peneliti terhadap intersep/konstanta (*intercept*), koefisien kemiringan (*slope coefficients*) dan variabel error (*error term*). Model regresi dengan data panel secara umum mengakibatkan kesulitan dalam spesifikasi modelnya. Residualnya akan mempunyai tiga kemungkinan yaitu residual *time series*, *cross-section* maupun gabungan keduanya. Maka terdapat tiga pendekatan dalam menggunakan data panel ini yaitu:

a. Pooled Least Square (PLS)

Metode ini juga dikenal sebagai *Common Effect Model* (CEM). Pada metode ini, model mengasumsikan bahwa data gabungan yang ada, menunjukkan kondisi sesungguhnya dimana nilai intersep dari masing-masing variabel adalah sama dan *slope* koefisien dari variabel-

variabel yang digunakan adalah identik untuk semua unit *cross-section*. Model data panel untuk teknik regresi adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{it} + \beta_3 X_{it}^2 + \dots + \beta_k X_{it}^{k-1} + \mu_{it}$$

b. Fixed Effect Model (FEM)

Fixed effect (efek tetap) dalam hal ini maksudnya adalah bahwa satu objek, memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian pula halnya dengan koefisien regresi yang memiliki besaran tetap dari waktu ke waktu. Model ini menambahkan variabel *dummy* untuk mengizinkan adanya perubahan *intercept*. Model data panel untuk teknik regresi adalah sebagai berikut;

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{it} + \dots + \beta_k X_{it}^{k-1} + \alpha_i + \mu_{it}$$

c. Random Effect Models (REM)

Dalam menganalisis regresi data panel, selain menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM), analisis regresi dapat pula menggunakan pendekatan *Random Effect Model* (REM). Pendekatan efek random ini digunakan untuk mengatasi kelemahan FEM yang menggunakan variabel semu, sehingga akibatnya model mengalami ketidakpastian. Model *random effect* adalah variasi dari estimasi *generalized least square* (GLS). Model data panel untuk teknik regresi adalah sebagai berikut;

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{it} + \dots + \beta_k X_{it}^{k-1} + \alpha_i + \mu_{it}$$

Sebelum ditentukan model regresi data panel yang akan dipakai, maka terlebih dahulu dilakukan Uji Chow dan Uji Hausman. Uji *Chow Test* yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah model *Pooled Least Square* (PLS) atau *Fixed Effect Model* (FEM) yang akan dipilih untuk estimasi data. Uji ini dapat dilakukan dengan uji *restricted F-Test* atau uji *Chow-Test*. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

H₀ : Model PLS (*Restricted*)

H₁ : Model FEM (*Unrestricted*)

Dasar penolakan terhadap hipotesa nol tersebut adalah dengan menggunakan F-statistik. Pengujian ini mengikuti distribusi F-statistik yaitu jika nilai *F-test* atau *Chow Statistik* (F-statistik) hasil pengujian lebih besar dari *F* tabel, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap hipotesa nol sehingga model yang akan digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

Setelah Uji Chow dilakukan lalu dilanjutkan dengan Uji Hausman. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang akan dipilih. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

H₀ : Model REM

H₁ : Model FEM

Dasar penolakan H₀ adalah dengan menggunakan pertimbangan statistic *Chi-Square*. Jika *Chi-Square* statistik > *Chi-Square* table maka H₀ ditolak (model yang digunakan adalah *Fixed Effect*).

Untuk menguji hipotesis, maka dilakukan tiga pengujian lainnya yakni: Uji F, uji t serta koefisien determinasi. Uji F atau uji model secara keseluruhan dilakukan untuk melihat apakah semua koefisien regresi berbeda dengan nol atau model diterima. Uji F dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai hasil uji (F-statistik) pada hasil regresi dengan F-tabel. Jika nilai *F-stat* > *F*-tabel, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Dengan kata lain, terdapat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Sebaliknya, jika *F-stat* < *F*-tabel, maka H₀ diterima dan H₁ ditolak. Dengan kata lain, tidak terdapat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Uji t merupakan pengujian terhadap koefisien dari variabel penduga atau variabel

bebas. Koefisien penduga perlu berbeda dari nol secara signifikan atau *pvalue* sangat kecil. Uji t biasanya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Uji t dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai hasil uji (t-statistik) pada hasil regresi dengan t-tabel. Jika jika nilai $t\text{-stat} > t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Koefisien determinasi menunjukkan kemampuan garis regresi menerangkan variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Atau bisa dikatakan Uji ini menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Nilai R_2 atau ($R_2 \text{ adjusted}$) berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, maka semakin baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banten resmi menjadi sebuah provinsi ke-30 di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak tahun 2000 yang dibentuk melalui Undang-undang nomor 23 tahun 2000. Sebelumnya Banten merupakan karesidenan sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Pada awal pembentukannya Banten memiliki 6 kabupaten/kota yaitu; Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang. Pada tanggal 17 Juli 2007 Kota Serang dibentuk sebagai kota otonom sedangkan Kota Tangerang Selatan dibentuk sebagai kota otonom pada tanggal 29 Oktober 2008, terpisah dari wilayah Kabupaten Tangerang. Saat ini Provinsi Banten memiliki 8 kabupaten/kota. Perekonomian daerah Provinsi Banten ditopang beberapa sektor diantaranya penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pertanian dan peternakan, perhutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, serta sektor pariwisata.

Langkah pertama yang dilakukan untuk mengetahui model data panel yang akan digunakan dalam penelitian ini apakah menggunakan PLS atau FEM, yaitu melakukan suatu uji yang dinamakan dengan Uji Chow. Dalam penentuan model data panel dengan menggunakan Uji Chow ini dilakukan dengan cara membandingkan Probability dari *Cross Section-F* dengan $\alpha = 0,05$. Pengujian hipotesa sebagai berikut:

H_0 : Model PLS (*Restricted*)

H_1 : Model FEM (*Unrestricted*)

Dari hasil regresi berdasarkan metode PLS dan FEM diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	5,695634	(7,22)	0,0007
<i>Cross-section Chi-square</i>	33,087485	7	0,0000

Dari Tabel 1 diperoleh nilai F-statistik sebesar 5,695634 dengan nilai probabilitas *cross-section F* sebesar 0,0007. ini berarti probabilitas *cross-section F* $< 0,05$ maka H_0 ditolak sehingga model data panel yang dapat digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Setelah Uji Chow dilakukan, maka dilakukan pula Uji Hausman yakni untuk mengetahui apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang dipilih. Uji Hausman ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas dan alpha dengan pengujian hipotesa sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model* (REM)

H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM)

Dari hasil regresi berdasarkan metode REM diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	4,902367	2	0,0862

Dari Tabel 2 diperoleh nilai *Chi-Square statistic* sebesar 4,902367 dan nilai probabilitas 0,0862. ini berarti probabilitas *cross-section random* > 0,05 maka H_0 diterima sehingga model data panel yang dapat digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).

Berdasarkan model *random effect*, maka hasil regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Regresi dengan *Random Effect Model*

Dependent Variable: BD?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Included observations: 4

Cross-sections included: 8

Total pool (balanced) observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1,95	9,61	2,024329	0,0522
PAD?	2,63	0,23	11,21377	0,0000
DAU?	0,94	0,16	5,854160	0,0000
R-squared	0,9173	Mean dependent var		5,90
Adjusted R-squared	0,9116	S.D. dependent var		4,15
S.E. of regression	1,23	Sum squared resid		4,40
F-statistic	160,967	Durbin-Watson stat		1,458
Prob(F-statistic)	0,0000			

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 3 dengan menggunakan pendekatan *Random Effect Model* (REM) didapatkan hasil persamaan sebagai berikut:

$$BD : 1,95 + 2,63*PAD + 0,94*DAU + e$$

Berdasarkan hasil regresi pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mempengaruhi Belanja Daerah secara signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai probabilitas F statistik yang lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Berdasarkan hasil uji t, maka Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh

signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini dapat diketahui dari nilai probabilitas masing-masing variabel yang lebih kecil dari tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Dari nilai koefisien PAD diketahui pengaruh positif antara PAD dengan Belanja Daerah. Setiap kenaikan 1 persen PAD akan meningkatkan BD sebesar 2,63 persen, dan sebaliknya. Hal ini menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu kontributor penyumbang dana dalam Belanja Daerah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) maka akan semakin baik dan semakin mandiri dalam hal keuangan daerahnya karena daerah tersebut dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri tanpa mengharapkan pemberian dari Pemerintah Pusat.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Sumarmi (2010) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, sehingga jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki Pemerintah Daerah akan lebih dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula.

Dana Alokasi Umum (DAU) juga berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah. Hasil ini ditunjukkan dari nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Semakin tinggi nilai DAU menyebabkan belanja daerah semakin besar pula. Dari nilai koefisien DAU diketahui bahwa setiap kenaikan 1 persen DAU akan meningkatkan BD sebesar 0,94 persen, dan sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersifat umum dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Suatu daerah yang potensi fiskalnya rendah maka Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterimanya tinggi. Sedangkan suatu daerah yang potensi fiskalnya tinggi maka Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterimanya rendah. Hal ini menunjukkan kemandirian Provinsi Banten tergantung pada Pemerintah Pusat untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerahnya. Dilihat juga dari pengertiannya tujuan pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) itu sendiri pada dasarnya sebagai "alat pancing" untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Prakosa (2004), dimana secara empiris besarnya Belanja daerah (BD) dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterimanya dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi. Jika hal ini masih berlangsung terus maka otonomi daerah kemungkinan besar akan terhambat.

Berdasarkan Tabel 3, nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,9116. Hal ini berarti bahwa 91,16 persen Belanja Daerah (BD) di Propinsi Banten dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sisanya yaitu 8,84 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model atau faktor-faktor lain di luar penelitian ini.

Analisis *flypaper effect* yang dapat disimpulkan dari hasil di atas adalah bahwa meskipun kedua variabel bebas (PAD dan DAU) secara signifikan dapat mempengaruhi variabel terikatnya (belanja daerah), namun PAD ternyata lebih berpengaruh dibandingkan DAU dimana koefisien regresi variabel PAD lebih besar dibandingkan koefisien regresi DAU. Dimana koefisien regresi dari PAD sebesar 2,63 sedangkan koefisien dari DAU sebesar 0,94. Ini menunjukkan bahwa tidak terjadi *Flypaper Effect* artinya kebijakan belanja daerah Pemerintah Provinsi Banten periode 2010-2013 lebih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) daripada Dana Alokasi Umum (DAU).

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa DAU dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sementara itu pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Dana Alokasi umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian dengan variabel yang digunakan menunjukkan tidak terjadi *flypaper effect* pada kabupaten dan kota di Provinsi Banten pada tahun 2010-2013.

REFERENSI

- Bahrul Ulum, R. (2010). Analisis determinan kinerja keuangan pemerintah daerah dan deteksi ilusi fiskal. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Bastian, I. (2006). Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Darise, N. (2009). *Pengelolaan keuangan daerah (Edisi 2)*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Deller, Steven & Craig Maher. (2005). Categorical municipal expenditures with a focus on the flypaper effect. *Public Budgeting/Fall*.
- Kesumadewi, Diah Ayu, & Arief Rahman. (2007). Flypaper effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia. *JAAI*, vol. 11(1), 67-80. Yogyakarta.
- Kuncoro, H. (2004). Pengaruh transfer antar pemerintah pada kinerja fiskal pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 9 (2).
- Legrenzi, Gabriella & Costas Milas. (2001). Non-linier and asymetrics adjustment in the local revenue expenditure models: some evidence from the Italian municipalities. University of Milan. Working paper.
- Maimunah, Mutiara. (2006). *Flypaper effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di pulau Sumatera*. Simposium nasional kuntansi IX.. Padang.
- Mankiw, Gregory. N. (2007). *Pengantar ekonomi makro, edisi kelima*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mankiw, N. G. 2003. Teori Makroekonomi.
- Prakosa, KB. (2004). Analisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap prediksi belanja daerah (studi empirik di wilayah propinsi Jawa Tengah dan DIY). *JAAI*, vol. 6 (2).
- Prasetya, F. (2012). *Modul ekonomi publik bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah*. Malang: Fakultas ekonomi dan bisnis. Universitas Brawijaya.
- Sukriy, A., & Halim, Abdul. (2004). Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah studi kasus kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Yogyakarta: *Jurnal ekonomi*, No.2/Th. XIII/25/, 90-109.
- Sumarmi, Saptaningsih. (2010). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal daerah kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. *Tesis*. Yogyakarta.
- Tresch, R. (2002). *Finance public Anormative theory*. Department of economic, Boston College Chestnut Hill, Massachusetts.